

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PANITIA PENGUJI	III
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VII
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka	10
1.5.1. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)	10
1.5.2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)..	20
1.5.3. Penghentian Penyidikan	23
1.5.4. Wewenang.....	28
1.5.5. Upaya Hukum	30
1.6. Metode Penelitian.....	32

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	32
1.6.2. Pendekatan (<i>Approach</i>).....	33
1.6.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	34
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	35
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	35
1.7. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II RATIO LEGIS PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	38
2.1. Alasan Hukum (<i>Legal Reasoning</i>) Pemberian Wewenang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kepada KPK ...	38
2.2. Wewenang Penghentian Penyidikan oleh KPK	47
2.3. Persyaratan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK	55
2.3.1. Dasar Teori Syarat Batasan Waktu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK	55
2.3.2. Keterkaitan Persyaratan Penghentian Penyidikan dalam UU KPK 19/2019 dan KUHAP	60
2.3.3. Akibat Hukum Pengaturan Penghentian Penyidikan dalam KUHAP terhadap Wewenang KPK	65
2.4. Prosedur Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK.....	70

2.5. Pencabutan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
oleh KPK..... 75

**BAB III UPAYA HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA
KORUPSI ATAS BATASAN WAKTU PENYIDIKAN KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) 80**

3.1. Batasan Waktu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK ... 80

3.2. Upaya Hukum atas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh
KPK yang Mencapai Batas Waktu 90

3.2.1. Praperadilan atas Tidak Sahnya Tindakan Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi yang disidik oleh KPK 97

3.2.2. Praperadilan atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana
Korupsi yang disidik oleh KPK 99

3.2.3. Praperadilan atas Tuntutan Penghentian Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi yang disidik oleh KPK 106

3.2.4. Praperadilan atas Tuntutan Ganti Kerugian 110

3.3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Upaya Hukum atas
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK yang Mencapai
Batas Waktu 114

3.3.1. Pemohon Praperadilan atas Tidak Sahnya Tindakan
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang disidik oleh
KPK 118

3.3.2. Pemohon Praperadilan atas Penetapan Tersangka Tindak
Pidana Korupsi yang disidik oleh KPK 120

3.3.3. Pemohon Praperadilan atas Tuntutan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang disidik oleh KPK	121
3.3.4. Pemohon Praperadilan atas Tuntutan Ganti Kerugian	124
BAB IV PENUTUP	126
4.1. Simpulan	126
4.2. Saran	128
DAFTAR BACAAN	